



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 450/Pdt.G/2020/PA.Ktb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

**Xxxxx**, tempat dan tanggal lahir Lontar, 07 September 1996, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Sekarang domisili di Jalan Selokayang, Gg. Sepakat No.30 RT.09, Desa Semayap, Kabupaten Kotabaru dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Subhan, S.H.I. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 November 2020, berdasarkan domisili elektronik dengan menggunakan alamat e-mail: [advokat.subhan@gmail.com](mailto:advokat.subhan@gmail.com) sebagai **Pemohon**;

melawan

**Xxxxx**, tempat dan tanggal lahir Lontar, 05 April 1997, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

Hal 1 dari 6 Hal Put. No. 450/Pdt.G/2020/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pihak Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 12 November 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru secara e-court tanggal 16 November 2020, dengan perkara Nomor 450/Pdt.G/2020/PA.Ktb, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 April 2019, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx, tanggal 10 April 2019;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan sekarang. Pada awal pernikahan, Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak awal bulan Mei Tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah Termohon bersifat emosional, keras kepala mau menang sendiri, sulit diberikan nasehat baik dari Pemohon ataupun orang tua pemohon, dan Termohon telah membiarkan (tidak memperdulikan) Pemohon sebagai seorang Suami. Bahwa antara Pemohon dan Termohon bersepakat baik-baik untuk berpisah dan kedua belah pihak keluarga sudah mengetahuinya;
4. Bahwa puncak perselisihan terjadi sekiranya pada pertengahan bulan Mei tahun 2020, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon kerumah orang tua Pemohon;
5. Bahwa sejak kepergian Pemohon tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri hingga sekarang sekiranya selama 6 (enam) bulan lamanya;

Hal 2 dari 6 Hal Put. No. 450/Pdt.G/2020/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga telah menasihati pihak Pemohon dengan Termohon agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pecah, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Dan apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah diberitahukan untuk datang menghadap sidang dua kali berturut turut berdasarkan relaas panggilan Pemohon Nomor 450/Pdt.G/2020/PA.Ktb, tanggal **18 November 2020 dan 27 November 2020**, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal 3 dari 6 Hal Put. No. 450/Pdt.G/2020/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan dan semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan secara lengkap telah tercatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian ini, maka Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak hadir menghadap dipersidangan, meskipun menurut berita acara panggilan (Relaas) tanggal 18 November 2020 dan 27 November 2020 yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan tidak datangnya Pemohon dua kali berturut-turut di persidangan tersebut, Pemohon dianggap tidak bersungguh-sungguh dengan Permohonannya, oleh karenanya sebagaimana ketentuan Pasal 148 RBg, gugatan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa perkara Nomor : 450/Pdt.G/2020/PA.Ktb, gugur;
2. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 1.126.000,00 (satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon;

Hal 4 dari 6 Hal Put. No. 450/Pdt.G/2020/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami **H. Riduan, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Siti Fatimah, S.H.I.,M.H.** dan **Imaduddin Sakagama, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Ahmad Fajar, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS,

**H. Riduan, S.Ag.**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

**Siti Fatimah, S.H.I.,M.H.**

**Imaduddin Sakagama, S.H.I.**

PANITERA PENGGANTI

**Ahmad Fajar, S.H.I.**

### Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya	Rp.	50.000,-
3.	Proses Biaya	Rp.	1.000.000,-
4.	Panggilan PNPB	Rp.	20.000,-
	Panggilan		

Hal 5 dari 6 Hal Put. No. 450/Pdt.G/2020/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	PNBP	Rp.	10.000,-
	Pendaftara		
6.	n Kuasa Biaya	Rp.	10.000,-
7.	Redaksi Biaya	Rp.	6.000,-
	Materai		
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp.</b>	<b>1.126.000,-</b>
Terbilang : (satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah)			

Hal 6 dari 6 Hal Put. No. 450/Pdt.G/2020/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)